

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Burhan ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Firdhonal, 2017, *Perlindungan Profesi Notaris, Hak ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatan Dalam menyikapi Permasalahan Hukum Notaris*, Jakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Habib Ajie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Revika Aditama, Bandung.
-, 2011, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
-, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cet.3, PT. Revika Aditama, Bandung.
-, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Bagio, 2017, *Peran Notaris sebagai pejabat public*, Semarang
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Buku Ketiga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta, Cakrawala Media
- Muliyawaty Syam, 2015, *pertanggungjawaban Hukum Notaris PPAT Terhadap Akta yang dibuatnya*, Semarang
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Kriminalisasi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Jabatannya*, Kudus
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, PT. Farisma Indonesia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia-Press
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Surabaya, CV.Mandar Maju
- Sunarti Marlianti Syarif, 2008, *Akibat Hukum terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Kenotariatan Serba Serbi Praktek Kenotariatan*, Cet.2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Zul Fadli, 2016, *Membedah Kode Etik Baru*, Majalah Renvoi

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2006, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW (Burgerlijke Wetboek)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ,2014, Bandung, Citra Umbara

Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, Habib Ajie, 2002, Semarang, Pustaka Zaman

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (perubahan terakhir dalam Rapat Pleno Pengurus pusat yang diperluas dibanten 30 mei 2015) , 2015, Banten, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

3. Kamus

Kamus Inggris Indonesia, Stadily, Hasan, 1989, Jakarta, PT. Gramedia

Kamus Lengkap, Inggris Indonesia-Indonesia Inggris, S. Nojowasito, Prof Hasta, 1992, Bandung

4. Internet

Admin,2017, *Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris*, didalam <http://law.ui.ac.id>,2017

Adysetiady,2012, *Kerangka Konseptual dan Hipotesis*, dalam adysetiadi.files.wordpress.com

Dewi Padusi Daeng Muri, 2017, *Mungkinkah Organisasi Notaris Diberi Kewenangan Beracara Khusus Membela Anggotanya*,dalam <http://medianotaris.com>

Dhyah Madya Ruth S. N., 2016, *Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC)*<http://www.indonesianotarycommunity.com>

Law Is May Way, 2017, *Kriminalisasi Terhadap Notaris PPAT Benarkah?*, dalam lawismyway.blogspot.co.id,